



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WISNU KUNTJORO ADI**
2. Jabatan : **VICE PRESIDENT INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN PROYEK**
3. NHK : **209142**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.331.114.000**

1. Tanah Seluas 8180 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 523.520.000
2. Tanah Seluas 6320 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 404.480.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/95 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 305.906.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1070 m2/200 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 561.000.000
5. Tanah Seluas 188 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 266.208.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/140 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 819.795.801**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER 2.0 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000



5. MOBIL, HONDA CRV 1.5 TC PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 519.795.801

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	332.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	512.565.002
F. HARTA LAINNYA	Rp.	40.000.000
Sub Total	Rp.	4.035.974.803
III. HUTANG	Rp.	96.724.320
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.939.250.483

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.